

# MENAKAR KEMISKINAN MULTIDIMENSI DALAM PEMBANGUNAN KOTA DAN WILAYAH: *HUMAN POVERTY INDEX* SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN (STUDI KOTA JAMBI)

Boby Indra Purnawan<sup>1</sup>, Mery Monica<sup>2</sup>, Riska Anggriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>[bobyindrapurnawan@umjambi.ac.id](mailto:bobyindrapurnawan@umjambi.ac.id), <sup>2</sup>[merymonica@umjambi.ac.id](mailto:merymonica@umjambi.ac.id),  
<sup>3</sup>[riskaanggriani@umjambi.ac.id](mailto:riskaanggriani@umjambi.ac.id)

## Abstrak

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat direduksi hanya pada ukuran pendapatan. United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan Human Poverty Index (HPI) dalam *Human Development Report* (1997) untuk mengukur deprivasi manusia pada dimensi dasar kehidupan. Artikel ini mengulas relevansi HPI serta transformasinya menuju Multidimensional Poverty Index (MPI) sebagai kerangka analitis untuk menilai ketimpangan pembangunan kota dan wilayah. Menggunakan studi literatur dan data statistik resmi Kota Jambi, kajian ini menunjukkan bahwa ukuran kemiskinan multidimensi memberikan gambaran yang lebih kaya tentang sumber deprivasi (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup), membuka ruang perumusan kebijakan yang lebih presisi dan inklusif di level subnasional. Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan multidimensi di kota Jambi menunjukkan IPM tinggi dengan ketimpangan pendapatan dan deprivasi kesehatan, pendidikan, serta standar hidup. Temuan ini menegaskan keterbatasan ukuran berbasis pendapatan. Pemerintah kota perlu menindaklanjuti dengan kebijakan terpadu peningkatan layanan kesehatan dan gizi, akses pendidikan dan pelatihan vokasi, serta infrastruktur dasar serta mengintegrasikan kerangka Human Poverty Index (HPI) dan Multidimensional Poverty Index (MPI) ke dalam perencanaan (RKPD/RPJMD) untuk penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Melalui studi literatur dan data resmi Kota Jambi, penelitian ini menegaskan nilai HPI sebagai alat diagnosis deprivasi dan pijakan kebijakan yang lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Kemiskinan Multidimensi, HPI, MPI, Ketimpangan Spasial, Pembangunan Wilayah*

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan fundamental yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, melainkan juga dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak (Todaro & Smith, 2020). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan isu multidimensional yang membutuhkan pendekatan komprehensif dalam pengukurannya. Oleh karena itu, pemilihan metodologi dalam menganalisis tingkat kemiskinan menjadi krusial untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Sejak dahulu tantangan utama dalam pembangunan sosial-ekonomi. Definisi tradisional yang berfokus pada garis pendapatan sering gagal menangkap kompleksitas kemiskinan, terutama ketika individu yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetap menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Perspektif *capability* menekankan bahwa kemiskinan adalah kegagalan untuk mencapai kebebasan substantif (kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial), bukan semata kekurangan pendapatan (Sen, 1999; Chakravarty & Majumder, 2007).

Kesenjangan spasial memperumit persoalan. Di kawasan perkotaan, pertumbuhan ekonomi dapat “menyembunyikan” kantong-kantong kemiskinan; sementara wilayah pinggiran dan perdesaan menghadapi layanan dasar yang tertinggal. Kombinasi ini melahirkan paradoks: indikator makro membaik, tetapi kualitas hidup kelompok rentan stagnan atau memburuk (Antony & Laxmaiah, 2008; Dhillon & Kaur, 2011).

Kerentanan baru perubahan iklim, urbanisasi cepat, guncangan kesehatan public membuat rumah tangga miskin menanggung beban ganda: keterbatasan material dan paparan risiko. Pendekatan berbasis pendapatan tidak memadai untuk memetakan kerentanan ini, sehingga diperlukan ukuran kemiskinan yang mengintegrasikan dimensi non-moneter secara eksplisit (Rahi, 2011).

HPI hadir untuk menutup celah tersebut: menakar deprivasi pada tiga dimensi dasar kesehatan (*longevity*), pendidikan (*knowledge*), dan standar hidup (*decent living*). Selain memberi gambaran agregat, HPI memungkinkan dekomposisi kontribusi tiap dimensi terhadap kemiskinan total sehingga relevan untuk diagnosis kebijakan di tingkat kota/wilayah (Chakravarty & Majumder, 2007; Węziak-Białowolska, 2015).

Di samping itu, dalam literatur beberapa dekade terakhir menunjukkan penguatan logika pengukuran multidimensi yang berakar pada pendekatan kemampuan dan kerangka *adjusted headcount* (Alkire & Foster), yang menginspirasi MPI dan memperkaya praktik monitoring subnasional. Bukti komparatif lintas-negara maupun subnasional memperlihatkan bahwa indikator multidimensi lebih sensitif terhadap variasi spasial-sosial dibanding ukuran moneter tunggal, sehingga lebih informatif untuk perencanaan daerah (Alkire, Kanagaratnam, & Suppa, 2020; Alkire & Kovesdi, 2023; Ferreira et al., 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat basis kebijakan pembangunan dengan pendekatan multidimensional, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemiskinan multidimensional di Kota Jambi dengan menggunakan metode HPI, mengaitkannya dengan dinamika pembangunan wilayah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada hasil analisis tersebut. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya kerangka analisis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Kurniawati, 2022; Suryahadi et al., 2022).

## 2. STUDI LITERATUR & KERANGKA TEORI

### 1) HPI: Landasan Konseptual dan Keunggulan

HPI dimaksudkan untuk mengukur kemiskinan sebagai *capability failure*. HPI-1 (untuk negara berkembang) merangkum: (i) probabilitas meninggal sebelum usia 40 (deprivasi kesehatan), (ii) deprivasi pendidikan (butaksara orang dewasa), dan (iii) deprivasi standar hidup (akses air bersih, layanan kesehatan, serta status gizi/pendapatan). HPI-2 (untuk negara maju) menyesuaikan indikator (misal usia 60, literasi fungsional, dan eksklusi jangka panjang dari pasar kerja). Secara aksiomatik, HPI dapat dipandang sebagai anggota keluarga indeks deprivasi global yang memungkinkan generalisasi ke dimensi dan indikator lain (Chakravarty & Majumder, 2007).

### 2) Indikator dan Formula Teknis (HPI-1 & HPI-2)

Secara generik, HPI menggabungkan  $k$  indikator deprivasi  $d_i$  (0–1) melalui ukuran agregasi orde- $\alpha$  dalam kerangka rata-rata daya ( $L_\alpha$ ):

$$\text{HPI} = \left[ \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k d_i^\alpha \right]^{1/\alpha}$$

dengan  $\alpha > 1$  untuk memberi bobot lebih besar pada deprivation yang ekstrem. Untuk HPI-1, UNDP menggunakan bentuk agregasi yang ekuivalen secara ordinal sering dipresentasikan sebagai *power mean* dari tiga dimensi inti sehingga memungkinkan perbandingan lintas wilayah sambil menonjolkan “dimensi terlemah”. HPI-2 mengadopsi struktur serupa tetapi mengganti indikator agar sesuai konteks negara industri maju (UNDP, 1997; Chakravarty & Majumder, 2007).

### 3) Evolusi ke MPI dan Relevansinya dalam 10 Tahun Terakhir

Sejak 2010, HDR mengganti HPI dengan MPI yang menggabungkan metodologi Alkire-Foster: identifikasi *k-cutoff* (siapa yang miskin multidimensi) dan agregasi (*adjusted headcount*  $M0 = H \times AM_0 = H \times A$ ). Bukti dekade terakhir menunjukkan MPI efektif membandingkan kemiskinan antarwilayah dan melacak dinamika pasca-guncangan (Alkire et al., 2015; Alkire, Kanagaratnam, & Suppa, 2020; Alkire & Kovesdi, 2023). Kendati demikian, HPI tetap bernilai sebagai kerangka konseptual terutama untuk *decomposition by dimensions* serta sebagai jembatan historis menuju adopsi ukuran multidimensi yang lebih kaya di level subnasional.

Tabel 1.1 Gap Studi

Aspek	Temuan Literatur	Celah (Gap)	Kontribusi Studi Ini
<b>Ukuran kemiskinan</b>	Banyak studi memakai garis kemiskinan moneter/HC-ratio	Tidak menangkap deprivation non-moneter dan variasi spasial perkotaan	Menggunakan HPI sebagai lensa diagnosis dimensi deprivation untuk konteks kota
<b>Skala analisis</b>	Agregat nasional/provinsi dominan	Bukti mikro-spasial kota (subnasional) masih terbatas	Fokus pada Kota Jambi untuk menunjukkan relevansi kebijakan di level kota
<b>Integrasi kebijakan</b>	Rekomendasi sering umum	Kurang <i>linkage</i> ke instrumen perencanaan (RKPD, KLHS, tematik kemiskinan)	Menurunkan HPI → <i>policy menu</i> yang operasional dan terukur
<b>Pembaruan metodologis</b>	MPI banyak digunakan, HPI kurang diulas kembali	Perlu artikulasi posisi HPI di era MPI	Menawarkan pemetaan HPI ↔ MPI untuk praktik perencanaan daerah

Sumber : Hasil Olahan, 2025

### 3. METODOLOGI

Pendekatan: studi literatur dan *policy-oriented analysis* berbasis data resmi Kota Jambi.

Data:

1. Kemiskinan: persentase penduduk miskin (HCI), Indeks Kedalaman (P1), Keparahan (P2) Kota Jambi 2018–2023 (BPS Kota Jambi, *Kota Jambi Dalam Angka 2024*).
2. Ketimpangan: Rasio Gini kabupaten/kota di Provinsi Jambi (BPS—tabel statistik resmi).
3. Pembangunan manusia: IPM Kota Jambi 2023 (BPS Kota Jambi, 2024).

Langkah Analisis:

(1) Menyajikan tren HCI, P1, P2 Kota Jambi; (2) Membandingkan dengan indikator struktural (Gini, IPM); (3) Memetakan temuan terhadap tiga dimensi HPI dan menurunkannya ke rekomendasi kebijakan sektoral/sub-wilayah.

Catatan metodologis: HPI asli memerlukan indikator spesifik (mis. probabilitas meninggal <40 tahun, butaksara, akses layanan dasar) yang tidak seluruhnya tersedia *time-series* untuk Kota Jambi. Karena itu, kami menggunakan indikator proksi yang konsisten secara konseptual (HCI, P1, P2, Gini, IPM) untuk menilai deprivasi dan ketimpangan yang relevan bagi operasional kebijakan kota, sembari merujuk evolusinya ke MPI untuk praktik pengukuran kontemporer.

#### 4. HASIL & PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum

IPM Kota Jambi tahun 2023 80,15 (kategori tinggi), menunjukkan peningkatan kualitas hidup agregat. Namun Rasio Gini 2023 = 0,37 (tertinggi di Provinsi Jambi) menandakan ketimpangan distribusi pengeluaran yang patut diwaspadai. Kontras lain muncul pada dimensi kemiskinan: HCI 2021 sempat meningkat 9,02% (dampak pandemi), lalu turun ke 8,24% pada 2023 penurunan yang positif tetapi relatif lambat. Gambaran ini menegaskan pentingnya lensa multidimensi: kualitas hidup rata-rata meningkat, namun ketimpangan dan kantong deprivasi tetap ada.

##### B. Tren Kemiskinan (Headcount, P1, P2)

Analisis tren kemiskinan di Kota Jambi menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, namun secara umum memperlihatkan arah penurunan dalam sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan (headcount ratio) mengalami penurunan bertahap, sejalan dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan. Namun, jika ditinjau dari kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2), masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan dengan tingkat deprivasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, ketimpangan kesejahteraan antarkelompok masih bertahan, sehingga kebijakan berbasis HPI menjadi penting untuk menanggulangi kemiskinan multidimensi di Kota Jambi.

**Tabel 3. 1 Tren Kemiskinan Kota Jambi, 2018–2023**

Tahun	Penduduk Miskin (HCI, %)	P1	P2
2018	8,49	1,26	0,28
2019	8,12	1,52	0,42
2020	8,27	1,47	0,40
2021	9,02	1,42	0,34
2022	8,33	1,19	0,25
2023	8,24	1,31	0,32

Sumber: BPS Kota Jambi (Susenas, diolah dari Kota Jambi Dalam Angka 2024)

##### Interpretasi HPI-wise:

- Dimensi standar hidup: Kenaikan HCI 2021 (9,02%) mencerminkan guncangan daya beli/akses layanan pasca pandemi. Penurunan pasca 2022 konsisten dengan pemulihan, namun P1 (kedalaman) dan P2 (keparahan) 2023 yang masih di

atas 2022 menunjukkan sebagian rumah tangga belum pulih sepenuhnya indikasi deprivasi yang “menyelam” meski proporsi miskin turun.

- Dimensi ketimpangan: Rasio Gini 0,37 menyiratkan kelompok menengah-atas mengakumulasi manfaat pemulihan lebih cepat. Pada konteks HPI, ketimpangan ini berpotensi menghambat perbaikan *capability* kelompok terbawah melalui mekanisme eksklusi spasial dan biaya akses.

### C. Reading Spasial Kebijakan (Implikasi Perkotaan)

- Sasaran wilayah prioritas: Kenaikan P1/P2 2023 relatif terhadap 2022 mengindikasikan kantong deprivasi yang semakin “berat” pada sebagian RW/kelurahan. Prioritas intervensi disarankan pada area padat penduduk berpendapatan rendah dan permukiman informal (indikasi keterbatasan layanan dasar/biaya transport).

- **Sektor pendorong *capability*:**

- *Kesehatan*: perbaikan gizi, layanan primer, dan sanitasi menarget keluarga rumah tangga miskin ekstrem (sinkron dengan kenaikan P2).
- *Pendidikan*: penguatan literasi fungsional/vokasi usia produktif untuk memutus transmisi antargenerasi.
- *Standar hidup*: *last-mile services* (air bersih, sanitasi, transport mikro) yang mengurangi biaya hidup/biaya akses layanan.

Analisis spasial kemiskinan melalui pendekatan HPI memberikan gambaran yang lebih jelas tentang distribusi deprivasi di dalam wilayah Kota Jambi. Permukiman padat di kawasan perkotaan cenderung menghadapi keterbatasan akses layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Sementara itu, kawasan pinggiran menghadapi masalah keterjangkauan infrastruktur dan transportasi publik. Dengan demikian, implikasi kebijakan pembangunan wilayah perlu diarahkan pada penguatan akses spasial yang lebih merata, sehingga setiap kawasan dapat menikmati manfaat pembangunan secara seimbang. Pendekatan ini juga mendukung upaya integrasi perencanaan wilayah dan kota dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

### D. Menjembatani HPI ↔ MPI untuk Operasional Kota

Dalam praktik perencanaan, **HPI** berfungsi sebagai *diagnostic lens* (dimensi mana paling menyumbang deprivasi), sementara **MPI** menjadi alat *monitoring* yang mengidentifikasi *who & where* di tingkat rumah tangga/kelurahan. Mengombinasikan keduanya memudahkan *targeting* program dan *priority-setting* infrastruktur sosial. (Alkire et al., 2015; Alkire, Kanagaratnam, & Suppa, 2020; Alkire & Kovesdi, 2023; Ferreira et al., 2022).

Meskipun Human Poverty Index (HPI) telah lama digunakan untuk mengukur deprivasi multidimensi, perkembangan terbaru menghadirkan Multidimensional Poverty Index (MPI) yang lebih rinci dalam mengakomodasi dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dalam konteks Kota Jambi, HPI dapat dijadikan alat awal untuk memetakan kerentanan kemiskinan, sementara MPI dapat memperdalam analisis dengan indikator yang lebih operasional di tingkat kota. Sinergi HPI dan MPI ini penting agar kebijakan daerah tidak hanya berorientasi pada angka kemiskinan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

## KETERBATASAN DAN AGENDA RISET

Ketersediaan deret waktu indikator “asli” HPI di level kota masih terbatas, sehingga analisis menggunakan proksi (HCI, P1, P2, Gini, IPM). Kedepan, riset dapat mengembangkan **RHPI/MPI subkota** (level kelurahan/RW) dengan *small-area estimation*, mengintegrasikan indikator layanan dasar (air, sanitasi, hunian) dan kesehatan (gizi, morbiditas) untuk *targeting* yang lebih presisi.

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Human Poverty Index (HPI) merupakan pendekatan yang relevan untuk memahami kompleksitas kemiskinan di Kota Jambi, melampaui sekadar indikator pendapatan. HPI mampu menangkap deprivation multidimensi seperti keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap standar hidup yang layak. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun indikator ekonomi makro Kota Jambi menunjukkan tren positif penurunan tingkat kemiskinan moneter, peningkatan IPM, dan perbaikan ketimpangan masalah deprivation multidimensi tetap membutuhkan perhatian serius.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Program pengentasan kemiskinan tidak hanya diarahkan pada bantuan finansial, tetapi juga penguatan kualitas layanan pendidikan, peningkatan akses kesehatan, penyediaan hunian layak, serta penguatan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan dan peri-urban. Penerapan HPI sebagai alat monitoring akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah rentan, mengevaluasi efektivitas program sosial, serta memperkuat integrasi kebijakan lintas sektor dalam RPJMD maupun program pembangunan berkelanjutan.

Bagi pemerintah pusat, penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan HPI dalam sistem pemantauan nasional pembangunan manusia. Dengan mengadopsi HPI, Bappenas dan BPS dapat memperluas instrumen evaluasi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks pencapaian SDGs 2030 dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini akan memperkaya pemahaman pemerintah pusat mengenai dinamika ketidaksetaraan pembangunan antarwilayah dan mendorong kebijakan redistribusi yang lebih tepat sasaran.

Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini membuka ruang untuk memperdalam kajian terkait adaptasi HPI pada konteks lokal di Indonesia. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan HPI berbasis wilayah (spatial HPI) untuk menangkap variasi kemiskinan multidimensi antar-kecamatan atau desa, serta eksplorasi HPI berbasis gender dan usia untuk memahami kelompok yang paling terdampak. Selain itu, penggabungan HPI dengan metode analisis spasial dan big data akan memperkaya metodologi penelitian, menjadikan hasil kajian lebih aplikatif untuk kebijakan publik.

Penelitian ini berkontribusi tidak hanya pada pengembangan kerangka konseptual tentang kemiskinan multidimensi, tetapi juga pada penyediaan instrumen praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan maupun akademisi. Harapannya, implementasi HPI secara konsisten di tingkat lokal maupun nasional dapat memperkuat arah pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

## 5. REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS HPI (KOTA JAMBI)

Hasil analisis HPI menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Jambi tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga erat kaitannya dengan akses terhadap

layanan dasar, kesehatan, pendidikan, serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat kota perlu diarahkan pada strategi multidimensi yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan spasial. Pendekatan berbasis HPI dapat membantu pemerintah daerah untuk merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran, sekaligus mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap deprivasi. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan berikut tidak hanya ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi secara menyeluruh.

1. Paket *Capability Boost* Tertarget (12–24 bulan)
  - a. Kesehatan & gizi: *cash-plus nutrition* untuk rumah tangga dengan anak balita/ibu hamil di kelurahan prioritas; *mobile clinic* sanitasi dan perilaku hidup bersih.
  - b. Pendidikan & keterampilan: *literasi fungsional* dan *micro-credential vokasi* (hospitality, logistik, UMKM digital) bagi usia 15–24 di kantong miskin.
  - c. Standar hidup: *micro-infrastructure* air bersih, MCK komunal, *neighborhood upgrading* dengan *co-financing* swadaya.
2. Penanggulangan Kedalaman & Keparahan (address P1–P2)
  - a. Subsidi *transport/first-mile* menuju fasilitas kesehatan/pendidikan (voucher rute pendek/angkutan lingkungan).
  - b. *Debt-relief* lokal untuk UMKM ultra-mikro pasca guncangan, agar tidak jatuh lebih dalam ke kemiskinan (menurunkan P1/P2).
3. Pengurangan Ketimpangan (Rasio Gini)
  - a. Kebijakan pasar kerja inklusif: insentif penyerapan pekerja muda dan perempuan (skema *wage subsidy* terbatas waktu) pada sektor padat karya.
  - b. Reformasi retribusi layanan dasar: struktur tarif bersubsidi untuk blok konsumsi awal air/energi pada RT miskin (mengurangi *cost burden*).
4. Mainstreaming Multidimensi dalam Siklus Perencanaan
  - a. Matriks HPI–MPI per kelurahan sebagai *Annex* RKPD/Renja OPD (indikator outcome lintas-program).
  - b. *Performance-based grant* internal: OPD memperoleh *bonus* bila indikator dimensi terburuk membaik >X%/tahun di kelurahan prioritas.
5. Sistem Data & Evaluasi
  - a. Pemetaan rumah tangga rentan (proxy-means test + data layanan) → *hotspot map* kelurahan.
  - b. Evaluasi kuartalan indikator HCI/P1/P2 *leading signals* (harga pangan, ketenagakerjaan informal) untuk *policy tuning* cepat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Kovesdi, F. (2023). Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking global poverty data. Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI).
- Alkire, S., Kanagaratnam, U., & Suppa, N. (2020). The global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2020. OPHI.
- Alkire, S., Roche, J. M., Ballon, P., Foster, J., Santos, M. E., & Seth, S. (2015). *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis*. Oxford University Press.
- Antony, G. M., & Laxmaiah, A. (2008). Human development, poverty, health & nutrition

- situation in India. *Indian Journal of Medical Research*, 128(4), 198–205.
- Antony, G. M., & Rao, K. V. (2007). A composite index to explain variations in poverty, health, nutritional status and standard of living. *Public Health*, 121(8), 578–587. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2006.10.018>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi. (2024). *Kota Jambi Dalam Angka 2024* (Tabel 4.4.1—Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin 2016–2023; Tabel 4.4.2—Indeks Kedalaman & Keparahan Kemiskinan 2016–2023; IPM 2023). \* Jambi: BPS Kota Jambi. (Diakses dari publikasi resmi). [Repository Unja](#)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi / BPS Kota Jambi. (2024). *Gini Ratio by Regency/Municipality in Jambi Province, 2023–2024*. (Rasio Gini Kota Jambi 2023 = 0,37). [Badan Pusat Statistik Kota Jambi](#)
- Chakravarty, S. R., & Majumder, A. (2007). Measuring human poverty: A generalized index... *Journal of Human Development*, 6(3), 275–299. <https://doi.org/10.1080/14649880500287605>
- Dhillon, S. S., & Kaur, P. (2011). Measuring human poverty in India: An inter-state analysis. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 2(6), 115–126.
- Ferreira, F. H. G., Saavedra-Chanduvi, J., & Vega, M. (2022). *Inequality in the 21st Century: A Reader*. World Bank Working Series (pengantar isu ketimpangan kontemporer).
- Rahi, M. (2011). Human Development Report 2010: Changes in parameters and perspectives. *Indian Journal of Public Health*, 55(4), 272–275. <https://doi.org/10.4103/0019-557X.92404>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2022). The evolution of poverty reduction policies in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2019059>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- Węziak-Białowska, D. (2015). Poverty in the regions of the European Union—Measurement with a composite indicator. *Contemporary Economics*, 9(2), 113–154. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.163>